

PELIBATAN MASYARAKAT PULAU KERA PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU

Ida Ayu Lochana Dewi dan Beatrix M. Rehatta¹⁾

ABSTRAK

Pariwisata adalah salah satu sector pembangunan yang dapat dikembangkan di Pulau Kera. Pulau Kera adalah salah satu pulau sangat kecil yang secara administratif merupakan bagian dari Desa Uiasa. Pengembangan kemampuan masyarakat untuk penyelenggaraan pariwisata melibatkan kelompok masyarakat di Pulau Kera dan Desa Uiasa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui karakteristik masyarakat Pulau Kera pada pengembangan pariwisata. Penelitian telah dilakukan di Pulau Kera pada Juni-September 2008. 90% penghuni Pulau Kera adalah Suku Bajo, dan sisanya adalah Suku Timor. Kisaran kesiapan sumberdaya manusia, sosial-ekonomi masyarakat di Pulau Kera, berdasarkan hasil modifikasi, adalah nilai kisaran 135-179 (kurang menunjang), 180-224 (menunjang), dan 225-270 (sangat menunjang). Nilai kesiapan masyarakat Pulau Kera adalah 230. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders terkait. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi stakeholders, penguatan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan hasil kelautan, dan pendidikan informal.

Kata Kunci : Ekowisata, Pulau Kera, Kesiapan Masyarakat, Pengelolaan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pulau-pulau kecil adalah salah satu sumberdaya alam yang tersebar luas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pulau-pulau kecil tersebut juga merupakan ciri khas Negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sebagian terbentuk melalui proses vulkanik sehingga tidak memiliki kemiripan dengan pulau induk yang mungkin ada di sekitarnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki beragam kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, dan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, serta masyarakat lokal.

Satu di antara beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata alam yang terletak di Provinsi NTT adalah Taman Wisata Alam Laut

(TWAL) Teluk Kupang, yang di dalamnya terdapat lima pulau-pulau kecil antara lain Pulau Kera, Pulau Tikus, Pulau Kambing, Pulau Tabui, dan Pulau Burung. Teluk Kupang ditetapkan sebagai salah satu taman wisata alam laut Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/Kpts-II/1993 tertanggal 28 Januari 1993. Luas TWAL Teluk Kupang adalah 50.000 ha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, salah satu fungsi taman wisata alam laut adalah sebagai kawasan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan wisata.

Pulau Kera adalah salah satu pulau kecil di dalam kawasan TWAL Teluk Kupang yang terletak antara Pulau Semau dan Pulau Timor, dan memiliki ciri khas tersusun atas hamparan pasir putih. Tekstur pasir di Pulau Kera sangat berbeda dengan tekstur pasir di Pulau Semau dan Pulau Timor. Pulau Kera, di samping memiliki hamparan pasir putih, juga memiliki berbagai jenis ikan karang, terumbu karang, dan pemandangan laut yang sangat indah merupakan antraksi wisata yang dapat ditawarkan pada para wisatawan.

Berdasarkan konsep ekowisata, pariwisata yang akan dikembangkan adalah pariwisata yang memiliki keberpihakan pada kelestarian sumberdaya alam dan kelestarian sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Mengacu pada konsep tersebut, maka peningkatan kesiapan masyarakat perlu dilakukan kajian tentang kesiapan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan kriteria standar masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Pulau Kera Kabupaten Kupang Provinsi NTT, pada Juni-September 2008. Luas daratan Pulau Kera secara keseluruhan adalah 46 hektar. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap yaitu survey pendahuluan, dan pengamatan langsung di lapang dilakukan untuk memperoleh data karakteristik wilayah daratan dan sosial budaya masyarakat yang digunakan sebagai bahan pengembangan areal daratan P. Kera untuk menunjang kegiatan pariwisata berkelanjutan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Pulau Kera dalam Kawasan Teluk Kupang)
<http://www.kimpraswil.go.id/infopeta/citra/spotxsindex.htm>

RANCANGAN PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif eksplorasi. Metode deskriptif eksplorasi digunakan untuk mengetahui besarnya nilai komponen kesiapan masyarakat, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mengkaji berbagai kemungkinan pengembangan peningkatan partisipasi masyarakat Pulau Kera. Penetapan menggunakan metode eksplorasi berdasarkan pertimbangan bahwa penelusuran kondisi wilayah pesisir untuk kegiatan pariwisata membutuhkan kajian mendalam berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, RRA, dan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen dan/atau hasil penelitian yang relevan yang tersimpan pada beberapa instansi terkait.

Data yang diperlukan pada penelitian ini mengacu pada Standar Kriteria Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi) tentang kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Analisis daerah operasi tersebut dikeluaran oleh Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia (Departemen Kehutanan 2002).

Tabel 1. Standar kriteria penilaian obyek dan daya tarik wisata alam

Keadaan Umum	Unsur
Sosial, budaya dan ekonomi	<p>a) Penduduk (jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, tenaga yang bekerja, struktur demografi, penyebaran dan tingkat kepadatan serta tingkat pendidikan dan agama/kepercayaan yang berada di sekitar kawasan)</p> <p>b) Budaya masyarakat lokal (keadaan adat istiadat/kebiasaan turun temurun dan kesenian khas serta hasil-hasil kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat)</p> <p>c) Ekonomi (keadaan perekonomian daerah misalnya sektor pertanian, industri, kerajinan, jasa angkutan, jasa perbankan, jasa komunikasi, perdagangan dan perkembangannya serta mata pencarian penduduk)</p> <p>d) Sarana dan prasarana (keadaan infrastruktur dan jumlah prasarana misalnya jalan, listrik, air bersih, telepon, internet, transportasi berupa pelabuhan laut, udara, terminal</p>

Sumber: Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan (2002)

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Komponen Utama (*Principle Component Analysis*) untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata, sedangkan untuk memperoleh kondisi umum dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Analisis data sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan pariwisata mengacu pada standar kriteria penilaian objek dan daya tarik wisata (Departemen Kehutanan 2002).

Tabel 2. Standar kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi (radius 1 km dari batas kawasan *intensive use* atau jarak terdekat)

No.	Unsur/Sub Unsur	Nilai			
		1	2	3	
1	Tata ruang wilayah obyek	Ada dan sesuai	Ada tapi tidak sesuai	Dalam proses penyusunan	Tidak ada
		30	25	20	15
2	Status lahan	Hutan negara	Hutan adat	Hutan hak	Tanah milik
		30	25	20	15
3	Mata pencaharian penduduk	Buruh tani dan nelayan	Pedagang, industri kecil dan pengrajin	Petani/nelayan	Pemilik lahan/kapal/pegawai
		30	25	20	15
4	Tingkat pengangguran	>40%	25-40%	10-40%	<10%
		30	25	20	15

No.	Unsur/Sub Unsur	Nilai			
		1	2	3	
5	Ruang gerak pengunjung (ha)	>50 30	41-50 25	31-40 20	<40 15
6	Pendidikan	Sebagian besar lulus SLTA ke atas 30	Sebagian besar lulus SLTP ke atas 25	Sebagian besar lulus SD 20	Sebagian besar tidak lulus SD 15
7	Tingkat kesuburan tanah	Sangat subur 30	Subur 25	Sedang 20	Tidak subur/ kritis 15
8	Sumberdaya alam mineral	Sangat potensial 30	Potensial 25	Kurang potensial 20	Tidak potensial 15
9	Persepsi masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata alam a. Kurang mendukung b. Mendukung c. Sangat mendukung d. Baik e. Menguntungkan	Ada 5 30	Ada 4 25	Ada 3 20	Ada 1-2 15
Jumlah					

Tabel 3. Standar Kriteria Pelayanan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Penelitian

Pulau Kera merupakan pulau kecil di perairan Teluk Kupang yang secara geografis berada pada posisi 123°33' 8,86"- 123°33' 34,29 LS dan 10°5' 5,71"-10°5' 40,46 BT di perairan Teluk Kupang. Secara administratif, Pulau Kera berada dalam wilayah Desa Uiasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Lokasi Pulau Kera tersebut sangat strategis sebab meskipun secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Kupang, secara geografis berhadapan langsung dengan jarak hanya 5.01858 mil dari Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa vegetasi darat pulau kera terdiri atas dua komunitas utama, yaitu komunitas *pes-caprae* di bagian pantai dan komunitas *barringtonia* di bagian tengah mengarah ke bagian Barat Laut pulau. Menurut Tomascik *et al.* (1997), komunitas *pest-caprae* dicirikan oleh *Ipomoea pes-caprae* yang berasosiasi dengan sejumlah spesies tumbuhan lain, sedangkan komunitas *barringtonia* dicirikan oleh *Barringtonia* spp, yang berasosiasi dengan sejumlah spesies tumbuhan lain. Kedua komunitas tersebut membentuk enam tipe asosiasi vegetasi sebagaimana disajikan pada Tabel 4 (Dewi, 2006).

Tabel 4. Tipe Asosiasi Vegetasi Darat di Pulau Kera

Asosiasi Vegetasi	Vegetasi Penciri	Tutupan	
		Luas (Ha)	%
I	<i>Ipomoea pes-caprae</i> dan <i>Spinifex littoreus</i>	4,56	10.10
II	<i>Ischaemum muticum</i>	14,37	31.81
III	<i>Andropogon halepense</i>	6,37	14.10
IV	<i>Sterculia</i> sp. (faloak)	10,29	22.78
V	<i>Sesbania grandiflora</i> (turi, legum)	7,57	16.76
VI	<i>Sporobolus</i> sp.	2,01	4.45
Total luas daratan bervegetasi		45,17	100.00

Sumber: Dewi (2006)

Ukuran P. Kera relatif tidak luas apabila dibandingkan dengan ukuran pulau-pulau kecil, hanya 48 ha. Berdasarkan topografinya yang relatif landai, posisinya relatif terbuka, dan kurangnya ketersediaan air bersih, maka analisis daya dukung hanya dilakukan pada kapasitas pantai untuk mengetahui daya

tampung wisatawan di pantai P. Kera Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dipetakan pada peta dasar P. Kera, panjang pantai P. Kera adalah 2,94 km atau 2.940 m.

Suku Helong sebagai Pemegang Hak Ulayat Pulau Kera

Deskripsi mengenai suku Helong sebagai pemegang hak ulayat atas Pulau Kera didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Adriana Bissilisin-Laidat, istri almarhum Fetor Bissilisin sebagai salah seorang raja Kupang yang wilayahnya mencakup Pulau Kera. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dipadukan dengan hasil wawancara dengan Dr. Hendrik Ataupah dan sumber-sumber tertulis yang dapat diperoleh, antara lain Ormeling (1955) dan Fox (1996).

Pada masa pemerintahan Fetor Bissilisin, Pulau Kera dijadikan tempat pengasingan bagi orang yang oleh raja telah dituntut bersalah tetapi yang bersangkutan berniat mengajukan permohonan ampun. Selama raja memikirkan keputusan terhadap permohonan ampun yang diajukan oleh orang yang sebelumnya telah dituntut bersalah, orang diasingka di pulau Kera sehingga oleh rakyat pulau tersebut diberi nama *Ku Kedang Lau Taik* yang dalam bahasa Helong berarti kugantung kesalahanmu untuk selanjutnya kuputuskan sanksinya. Selain sebagai tempat pengasingan sementara, pada masa pemerintahan Fetor Bissilisin, Pulau Kera juga merupakan tempat yang dikeramatkan bagi kelompok masyarakat Helong.

Pulau Kera pada mulanya merupakan pulau tidak berpenghuni yang dijadikan sebagai lokasi untuk mencari telur penyu. Sebagai lokasi pencarian telur penyu, pulau yang semula tidak berpenghuni ini diberi nama sesuai dengan bahasa suku-suku yang pernah melakukan pencarian telur penyu di pulau tersebut. Oleh orang Rote pulau ini disebut Pulau Kea (kea dalam bahasa Rote berarti penyu) dan oleh orang Meto (Dawan) disebut Pulau Ke' atau Pul Ke' (ke'; dalam bahasa Meto juga berarti penyu). Tidak ada penjelasan bagaimana nama Pulau Kea atau Pulau Ke' tersebut berubah menjadi Pulau Kera mengingat sesungguhnya di pulau tersebut tidak terdapat seekor kera pun. Diduga perubahan tersebut terjadi sebagai bentuk kesalahan dengar terhadap pengucapan kata kea sebagai kera oleh penduduk berbahasa Melayu Kupang di Kota Kupang.

Suku Bajo sebagai Penduduk Pemukim Sementara di Pulau Kera

Pada saat ini Pulau Kera digunakan sebagai tempat bermukim sementara oleh sekelompok masyarakat suku Bajo (Bajau). Sesuai dengan hasil wawancara dengan Arshat Abdullah, tokoh masyarakat suku bajo di Pulau Kera, masyarakat suku Bajo yang bermukim sementara di Pulau Kera saat ini terdiri atas 46 rumah tangga dengan penduduk sebanyak 225 jiwa.

Menurut Dhohani *dalam* Tomascik 1997, suku Bajo yang menggunakan cara tradisional dalam mengeksplorasi sumberdaya perairan laut akan selalu tersisih dalam persaingan dengan suku-suku lain yang mengeksplorasi sumberdaya yang sama dengan menggunakan cara-cara yang modern. Secara budaya, suku Bajo yang oleh Monk *et al.* (1997) disebut kaum gipsi laut (*sea gypsies*) memandang laut sebagai teman yang harus dihormati, sedangkan suku-suku lain memandang laut sekedar sebagai tempat yang dapat dikuras untuk memperoleh kebutuhan hidup. Perpindahan suku Bajo dari Pulau Semau ke Pulau Kera diduga terjadi karena tersisih oleh suku Bugis dalam kaitan dengan lokasi penangkapan ikan maupun pemasaran hasil tangkapan.

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat suku Bajo menggunakan bahasa Bajo untuk berinteraksi dengan sesamanya. Tentunya bahasa dan dialek yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh masyarakat Adonara pada umumnya yaitu Bahasa Lamaholot. Bahasa dan dialek mereka akan berbeda jika mereka berinteraksi dengan masyarakat Adonara yang berasal dari rumpun Lamaholot. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lamaholot dengan dialek yang persis sama dengan dialek masyarakat yang berasal dari kecamatan Witihama.

Selain dalam hal penggunaan bahasa, hal lain yang layak untuk disaksikan adalah hasil kebudayaan masyarakat suku Bajo. Barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat suku Bajo yang pada umumnya adalah nelayan ini mencerminkan perpaduan dua budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari corak kain tenun suku Bajo. Corak yang ditampilkan dalam hasil tenunan terlihat bukan merupakan corak asli masyarakat Adonara tetapi sudah bercampur dengan corak kain tenun dari Sulawesi Selatan.

Suku Bajo yang sejatinya adalah penghuni laut karena kondisi politik dipaksa menjadi penghuni daratan. Bayangkan jika manusia yang terbiasa

menebar jala harus mencangkul tanah. Beruntung, Bajo masih memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki. Seiring melemahnya pemerintahan Orde Baru yang renta, mereka kembali menjelajahi lautan yang menjadi tempat umbo made laut (ibunda lautan) bersemayam.

Kondisi serupa juga dialami oleh Suku Bajo di Pulau Kera. Beberapa anggota Suku Bajo masih memiliki kekerabatan dengan Suku Bajo yang tinggal di wilayah Semau (Pulau Timor) dan wilayah Semau. Namun, persaingan yang ketat dengan Suku Bugis yang lebih mampu menguasai pasar penjualan ikan, menyebabkan posisi Suku Bajo ini menjadi terpinggirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pong, Mantan Kepala Desa Uiasa dan tokoh Masyarakat Helong, suku Bajo yang kini bermukim di Pulau Kera sebelumnya bermukim di Pulau Semau. Namun perkembangan penduduk suku Bugis yang juga bermukim di pulau Semau menyebabkan sekelompok suku Bajo berpindah ke Pulau Kera. Perpindahan ini merupakan fenomena alami yang terjadi sebagai bentuk perbedaan budaya dan cara hidup.

Oleh karena itu, hingga saat ini hanya sebagian anggota saja yang bertahan di wilayah Semau, sedangkan sebagian besar melakukan perjalanan tetap ke wilayah-wilayah penangkapan ikan. Menurut Arshat Abdullah, keberadaan Suku Bajo di Pulau Kera mempunyai sejarah yang lama, ditandai dengan adanya makam tua seorang leluhur suku Bajo yang diperkirakan dikubur pada 1915. Pada umumnya, Suku Bajo akan mendiami beberapa daerah yang telah dihuni terlebih dahulu oleh pendahulunya sebagai salah satu bentuk kedekatan emosional.

Seiring dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kupang yang menetapkan Pulau Kera sebagai kawasan pengembangan pariwisata maka pada tahun 2000 pemerintah Kabupaten Kupang mengambil kebijakan untuk memukimkan kembali suku Bajo dari Pulau Kera ke Desa Uiasa di Pulau Semau. Namun karena lokasi permukiman jauh dari pantai, suku Bajo di Pulau Kera merasa enggan untuk dipindahkan ke lokasi permukiman yang telah dibangun pemerintah tersebut.

Penilaian Sosial Ekonomi Masyarakat pada Perencanaan Pariwisata

Pariwisata yang dikembangkan di Pulau Kera adalah pariwisata terpadu. Pariwisata terpadu adalah bentuk penyelenggaraan pariwisata yang memberikan

peluang untuk secara bersama-sama dikembangkan dengan sektor pembangunan lainnya, menggunakan berbagai sarana penunjang yang ada di sekitar Pulau Kera, dan pengembangan paket wisata dengan kawasan wisata yang ada di sekitarnya. Mengingat jarak Pulau Kera dengan daratan di sekitarnya relatif dekat, dan dapat dilakukan dengan waktu tempuh 1-1,5 jam serta luasan pulau hanya 48 ha, maka bentuk wisata yang ditawarkan adalah wisata satu hari. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata tidak perlu dilakukan di Pulau Kera, namun disiasati dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang yang ada di daratan di sekitarnya sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya.

Boo (1995) menyatakan bahwa diperlukan suatu strategi untuk memandu pengembangan dan pengelolaan ekowisata, memastikan bahwa kawasan yang dikelola untuk pariwisata tidak dirusak oleh wisatawan, menetapkan mekanisme penyediaan lapangan pekerjaan dan keuntungan bagi kawasan dan masyarakat, dan menciptakan peluang untuk pendidikan lingkungan bagi pengunjung. Strategi yang ditawarkan pada perencanaan antara lain menilai situasi saat ini, menentukan tingkat kunjungan, dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata.

Terkait dengan perencanaan pariwisata di Pulau Kera, penilaian terhadap kondisi Pulau Kera telah dilakukan dengan menggunakan standar kriteria analisis daerah operasi (Departemen Kehutanan 2002), dan tingkat kunjungan juga telah dilakukan dengan menggunakan analisis daya dukung (Wong 1991). Tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan pariwisata. Penyusunan dokumen rencana tersebut memerlukan keterpaduan untuk memandang satu konsep kegiatan ekowisata yang akan dikembangkan di Pulau Kera oleh semua *stakeholder* yang terkait. Guna mewujudkan kesamaan visi dan misi tersebut maka identifikasi *stakeholders* perlu dilakukan.

Fenomena yang terjadi adalah semakin luas kawasan yang akan dikembangkan akan berdampak pada semakin kompleksnya kepentingan yang terjadi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya pendapat bahwa kawasan laut bersifat terbuka bagi berbagai jenis bentuk pengelolaan, dan sering terlupakan konsep pengelolaan berwawasan lingkungan, sehingga pengelolaan kawasan yang sangat luas dan melibatkan dua daerah administratif sering menimbulkan kompleksitas pengelolaan kawasan.

Mengingat kompleksitas pengelolaan suatu kawasan pulau, maka padu serasi di antara para *stakeholders* yang terlibat perlu dilakukan sebelum menyusun dokumen rencana aksi pariwisata di Pulau Kera. Kompleksitas pengelolaan dimaksud adalah adanya beberapa sektor pembangunan yang dapat dilakukan secara terpadu di kawasan TWAL Teluk Kupang, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada penyelenggaraan pariwisata di Pulau Kera. Dokumen rencana aksi pariwisata di Pulau Kera merupakan dokumen rencana detail penataan ruang dan program pengembangan sumberdaya manusia yang disusun berdasarkan kesepakatan seluruh *stakeholder* yang terlibat.

Pada penelitian ini, program pengembangan wilayah yang ditawarkan sebagai bahan pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk melakukan pengembangan partisipasi guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pulau Kera. Mengacu pada program pengembangan wilayah dan sarana pendukung kegiatan pariwisata, maka stakeholders yang terlinat pada masing-masing kegiatan antara lain:

- 1) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dan/atau Kota Kupang, perguruan tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang dan/atau Kota Kupang, Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan/atau Kota Kupang, dan pihak swasta.
- 2) Program penghijauan dan penelitian tanaman pelindung pantai untuk meningkatkan nilai tedyuhan di areal pesisir dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, Dinas Kehutanan, BKSDA.
- 3) Program pembangunan dermaga rakyat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan/atau Kota Kupang, TNI Angkatan Laut.
- 4) Penyediaan sarana tempat tinggal dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kupang dan/atau Kota Kupang, perguruan tinggi, dan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab Hasil dan Pembahasan tentang Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Kera pada Pengembangan Pariwisata, terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Pemandangan dari Pulau Kera ke arah luar pulau merupakan salah satu daya tarik wisata di samping keanekaragaman hayati daratan dan perairan. Matahari terbenam dan matahari terbit adalah pemandangan yang sangat indah dan diyakini mampu memberikan nilai kepuasan tersendiri bagi wisatawan. Selain dapat menyaksikan terbenam dan terbitnya matahari, keindahan Pulau Timor (daratan yang berbatasan dengan Teluk Kupang) di malam hari sangat indah menambah nilai keindahan pemandangan dari Pulau Kera ke arah luar pulau.
- 2) Masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* pariwisata memiliki karakteristik yang unik dan masih memerlukan upaya pemberdayaan lebih lanjut guna meningkatkan kesiapan untuk berperan aktif pada sektor pariwisata. Program utama pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya.
 - b) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesiapan masyarakat untuk berperan aktif pada pengembangan sektor pariwisata.
- 3) Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, bentuk pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata terintegrasi. Pariwisata terintegrasi dimaksudkan adalah pengembangan pola paket wisata dengan objek wisata yang relatif berdekatan dengan Pulau Kera, dan pengoptimalan sarana prasarana yang telah ada di daerah di sekitar Pulau Kera (daratan Timor dan Pulau Semau).

Mengacu kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran guna menyempurnakan perencanaan pariwisata Pulau Kera sebagai berikut:

- 1) Perlu dilaksanakan *diagnostic stakeholders* untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di Pulau Kera. Para *stakeholder* pada pengembangan pariwisata di Pulau

Kera meliputi Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota Kupang, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang, perguruan tinggi di Provinsi NTT khususnya yang berada di sekitar TWAL Teluk Kupang, BKSDA, Pemerintah Provinsi NTT, Bappeda Kabupaten Kupang, Bappeda Kota Kupang, Tokoh Adat dan Agama masyarakat Bajo, Keluarga Raja Bissilisin, Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota Kupang, dan masyarakat di sekitar TWAL Teluk Kupang.

- 2) Pola kerjasama dalam penyelenggaraan pariwisata di Pulau Kera bagi para *stakeholders* adalah *co-management*.
- 3) Pulau Kera untuk mengetahui pola pembagian penggunaan ruang untuk pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan, 2002. Kreteria-Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi. Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Fox, J.J. 1996. The paradox of powerlessness: Timor in historical perspective. Paper Presented at The Noble Peace Prize Symposium: Focus on East Timor. Available from:
http://www.rspas.anu.edu.au/people/personal/foxxj_rspas.php.
Downloaded on: July 27, 2006.
- Gunn, C. A. 1994. Tourism Planning: Basics, Concept, Case. Third Edition. Taylor and Francis. Washington DC.
- Sekartjakrarini S, 2004. Ekowisata: Konsep Pengembangan dan Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Lingkungan. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Masalah Pembangunan dan Lingkungan di Program S3 Kelas Penyelenggaraan Khusus Kimpraswil Plus Program Studi PSL-IPB, diselenggarakan oleh Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Tanggal 15 Mei 2004.
- Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, & M.K. Moosa. The Ecology of Indonesian Seas. Part Two. The Ecology of Indonesia Series Volume VIII. Periplus Edition, Singapore.